

Mekanisme transmisi konsekuensi ekonomi dari perubahan kebijakan akuntansi: studi literatur

Luthfia Cahya Az-Zahra

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang²
e-mail: *210502110120@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

intervensi politik, standar akuntansi, teori konsekuensi ekonomi, teori akuntansi positif, FASB

Keywords:

political intervention, accounting standard, economic consequences theory, positive accounting theory, FASB

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intervensi politik dalam proses penyusunan standar akuntansi, dengan mempertimbangkan perspektif teori konsekuensi ekonomi dan teori akuntansi positif. Menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam penyusunan standar akuntansi merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Teori konsekuensi ekonomi menjelaskan bahwa keputusan politik dalam bidang akuntansi dapat memiliki dampak

ekonomi yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, teori akuntansi positif memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa pihak-pihak tertentu memiliki insentif untuk mempengaruhi proses penyusunan standar akuntansi. Penelitian ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pertimbangan politik, ekonomi, dan teknis dalam proses penyusunan standar akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan implikasi dari intervensi politik dalam penyusunan standar akuntansi.

A B S T R A C T

This study aims to examine the influence of political intervention in the standard-setting process, considering the perspectives of economic consequences theory and positive accounting theory. Using a literature review method, this study analyzes various empirical studies previously conducted on this topic. The results show that political intervention in standard setting is a complex and multidimensional phenomenon. Economic consequences theory explains that political decisions in accounting can have significant economic impacts, both on individual companies and on the overall economy. Meanwhile, positive accounting theory provides a framework for understanding why certain parties have incentives to influence the standard-setting process. This study highlights the importance of balancing political, economic, and technical considerations in the standard-setting process. In addition, this study also identifies several challenges and implications of political intervention in standard setting.

Pendahuluan

Dinamika lingkungan bisnis global yang semakin kompleks telah memaksa adanya konvergensi menuju prinsip-prinsip akuntansi internasional yang lebih harmonis. Perubahan paradigma dalam teori akuntansi telah memicu evolusi standar akuntansi yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna informasi keuangan, terutama investor dan kreditor (Melinda, 2024). Standar akuntansi pada dasarnya dirancang untuk menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, standar ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator. Selain itu, standar juga berfungsi sebagai pedoman umum yang memastikan keseragaman dalam



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

praktik akuntansi, sehingga laporan keuangan dari berbagai entitas dapat dibandingkan. Tujuan utama lainnya adalah untuk membatasi ruang gerak manajemen dalam memanipulasi angka-angka (*moral hazard*) demi kepentingan pribadi. Meskipun demikian, proses pembentukan standar sendiri merupakan suatu proses politik yang kompleks, di mana berbagai kepentingan kelompok akan saling tarik-menarik, sehingga *moral hazard* dalam bentuk yang berbeda tetap dapat terjadi (Melinda, 2024).

Gerboth (1973) menjelaskan bahwa standar akuntansi bukanlah sekadar hasil teknis, melainkan juga cerminan dari dinamika politik. Pembentukan standar akuntansi merupakan respons terhadap permasalahan ekonomi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan kelompok. Dalam konteks ini, politik dan ekonomi saling terkait erat. Keputusan politik dalam merumuskan standar akuntansi pada dasarnya adalah refleksi dari kepentingan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi dan politik, sehingga pemilihan sistem, standar, maupun metode akuntansi selalu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis.

Penelitian Watts dan Zimmerman (1978) dalam (Purba et al., 2018) memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana kekuatan politik dapat memengaruhi proses pembentukan standar akuntansi. Teori mereka menjelaskan bahwa intervensi politik dalam penetapan standar merupakan bentuk dari perilaku oportunistik yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas pribadi atau kelompok. Dengan demikian, standar akuntansi tidak selalu netral dan objektif, melainkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang beragam. Pada pergantian abad ke-20, pemerintah Amerika Serikat mulai aktif melakukan regulasi sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dominasi pasar oleh monopoli. Monopoli dianggap sebagai bentuk kegagalan pasar yang serius karena dapat menghambat inovasi, mengurangi pilihan konsumen, dan meningkatkan harga. Oleh karena itu, regulasi menjadi instrumen penting untuk menjaga persaingan sehat dan memastikan pasar berfungsi secara efisien. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa pasar yang kompetitif adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Purba et al., 2018).

Scroeder & Clark (1995) dalam Adam (2011) berpendapat bahwa konsekuensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama dalam perkembangan standar akuntansi. Perubahan dalam lingkungan bisnis akan memunculkan kebutuhan akan standar akuntansi yang baru atau revisi terhadap standar yang sudah ada. Namun, proses pembentukan standar ini tidak pernah lepas dari pertimbangan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Akibatnya, tekanan politik dan ekonomi seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyusunan standar. Watt (1977) dalam Adam (2011) menjelaskan bahwa Standar akuntansi dapat dipandang sebagai hasil dari negosiasi antara berbagai kepentingan kelompok. Setiap kelompok akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri melalui standar akuntansi. Akibatnya, standar yang dihasilkan seringkali merupakan kompromi antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan.

Financial Accounting Foundation (FAF) mengibaratkan proses penetapan standar akuntansi sebagai sebuah demokrasi. Namun, karena standar akuntansi memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat, maka proses pembuatannya harus bersifat

inklusif dan melibatkan berbagai perspektif. Di sisi lain, proses pembentukan standar juga mengandung unsur politik. FAF memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa standar yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mempertimbangkan pengaruh politik dalam proses pembuatan standar, mengingat hal ini dapat berdampak pada kredibilitas akuntansi. Keputusan politik dalam merumuskan standar akuntansi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan, seperti efisiensi alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi (Mardiyah, 2002).

Perubahan kebijakan akuntansi seringkali memicu debat yang sengit di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga dapat memicu perubahan perilaku pelaku ekonomi dan berimplikasi pada kinerja perusahaan serta stabilitas pasar keuangan. Artikel ini akan mengkaji bagaimana pertimbangan-pertimbangan ekonomi memainkan peran sentral dalam pembentukan standar akuntansi. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana konsekuensi ekonomi dari suatu standar akuntansi dapat mempengaruhi proses politik dalam penyusunan standar tersebut. Dengan kata lain, artikel ini akan menganalisis hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik dalam konteks pembentukan standar akuntansi.

Kajian Teori

Konsekuensi Ekonomi

Penelitian ini menggunakan teori konsekuensi ekonomi yang dicetuskan oleh Zeff (1978). Konsep konsekuensi ekonomi berpendapat bahwa pilihan akuntansi yang berbeda dapat berdampak signifikan pada nilai perusahaan di pasar saham. Pandangan ini berbeda dengan teori pasar efisien yang menganggap bahwa pasar saham selalu mencerminkan semua informasi yang relevan. Konsekuensinya, manajemen perusahaan sangat memperhatikan kebijakan akuntansi karena hal ini dapat memengaruhi persepsi investor dan, pada akhirnya, harga saham perusahaan.

Menurut Zeff, laporan akuntansi bukan hanya laporan pasif, melainkan juga alat yang aktif dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Laporan keuangan dapat mendorong manajer dan pihak lain untuk mengambil keputusan tertentu. Zeff memberikan banyak contoh kasus di mana perusahaan, asosiasi bisnis, dan pemerintah berusaha mempengaruhi proses pembuatan standar akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Campur tangan pihak ketiga dalam pembuatan standar akuntansi, seperti yang dijelaskan oleh Zeff, membuat standar akuntansi menjadi kurang objektif. Idealnya, pemilihan metode akuntansi hanya akan melibatkan badan pembuat standar dan auditor, sehingga keputusan yang diambil akan lebih berfokus pada prinsip-prinsip akuntansi yang sudah mapan. Namun, dalam kenyataannya, berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda turut mempengaruhi proses pembuatan standar, sehingga standar akuntansi yang dihasilkan seringkali menjadi kompromi dari berbagai kepentingan tersebut.

Dalam upaya menciptakan ketertiban dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, lembaga pembuat standar akuntansi merumuskan berbagai aturan. Aturan-aturan ini, yang kita kenal sebagai standar akuntansi, memberikan kerangka kerja bagi perusahaan dalam mengukur dan melaporkan aktivitas bisnis mereka. Standar-standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan suatu transaksi hingga penilaian aset dan liabilitas. Namun, penting untuk diingat bahwa standar akuntansi tidak bersifat kaku dan memberikan ruang bagi interpretasi. Dalam banyak kasus, standar akuntansi menyediakan beberapa alternatif metode akuntansi yang dapat dipilih oleh manajemen. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memilih metode yang paling relevan dan akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan mereka. Teori konsekuensi ekonomi menyoroti kenyataan bahwa proses pembuatan standar akuntansi tidak selalu berjalan murni berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah mapan. Lembaga pembuat standar sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu konsisten dengan teori akuntansi seperti biaya historis.

Zeff, dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa intervensi pihak ketiga, seperti kelompok industri, regulator, atau investor, dapat secara signifikan mempengaruhi pilihan metode akuntansi yang tercantum dalam standar akuntansi. Pihak-pihak ini seringkali melobi agar standar akuntansi disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan kepentingan mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang objektif. Salah satu contoh yang seringkali menjadi perdebatan adalah pemilihan antara metode biaya penggantian dan biaya historis dalam menilai aset. Metode biaya penggantian menilai aset berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk mengganti aset tersebut saat ini, sedangkan biaya historis menggunakan biaya perolehan awal. Perdebatan mengenai metode mana yang lebih relevan seringkali melibatkan pertimbangan ekonomi dan politik, di samping pertimbangan akuntansi semata.

Teori Akuntansi Positif

Konsep teori akuntansi positif pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1978, sebuah tonggak sejarah yang menandai pergeseran paradigma dalam penelitian akuntansi. Dengan menekankan pada pengujian empiris, teori ini memungkinkan para peneliti untuk memahami secara lebih mendalam mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu. Melalui analisis kuantitatif, teori ini telah berhasil mengungkap hubungan antara keputusan akuntansi dengan faktor-faktor ekonomi dan institusional yang lebih luas. Selain itu, teori akuntansi positif juga berperan sebagai landasan bagi pengembangan model-model akuntansi yang lebih relevan dengan dinamika bisnis modern. Dengan mengidentifikasi celah-celah dalam standar akuntansi yang ada, teori ini berkontribusi pada perbaikan kualitas informasi akuntansi yang tersedia bagi pengguna (Mikraj & Waluyani, 2023).

Menurut Scott (2009) yang dikutip oleh (Setijaningsih, 2012) Teori akuntansi positif berusaha menggali lebih dalam mengenai alasan di balik keputusan-keputusan akuntansi yang diambil oleh perusahaan. Intinya, teori ini ingin memahami apa yang mendorong suatu perusahaan memilih metode akuntansi tertentu dibandingkan yang lainnya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pilihan ini adalah upaya

perusahaan untuk meminimalkan biaya. Biaya yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada biaya modal, namun juga mencakup berbagai jenis biaya kontrak yang mungkin timbul akibat pilihan akuntansi tersebut.

Struktur organisasi perusahaan juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan akuntansi. Bagaimana sebuah perusahaan diorganisir, siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi, semuanya akan turut membentuk pilihan akuntansi yang diambil. Dengan kata lain, pemilihan metode akuntansi bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari keseluruhan sistem tata kelola perusahaan. Keputusan ini mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola hubungannya dengan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator (Setijaningsih, 2012).

Teori Akuntansi Positif menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis implikasi ekonomi dari kebijakan akuntansi. Dari perspektif efisiensi, teori ini menunjukkan bagaimana pilihan kebijakan akuntansi dapat memengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Sementara itu, perspektif oportunistik menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dalam proses pengambilan keputusan akuntansi. Dengan demikian, teori akuntansi positif tidak hanya menjelaskan fenomena akuntansi yang ada, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi para pengambil keputusan dalam merancang dan menerapkan kebijakan akuntansi yang efektif (Saragih et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sebagai instrumen utama pengumpulan data. Kajian literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konsep-konsep teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi, peneliti berusaha untuk membangun kerangka teoretis yang kuat dan komprehensif sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pencarian literatur secara sistematis melalui berbagai database jurnal, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lainnya. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, kualitas sumber, dan rentang waktu publikasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasi, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh. Analisis data ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep penting yang muncul dalam literatur, serta membangun argumen yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pembahasan

Intervensi Politik dalam Penyusunan Standar Akuntansi

May dan Sundem (1976) dalam Mardiyah (2002) telah lama menggarisbawahi bahwa laporan keuangan tidak hanya sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini begitu signifikan, baik dalam praktik bisnis sehari-hari maupun dalam kajian teori akuntansi. Oleh karena itu, wajar jika lembaga seperti FASB sering dianggap sebagai arena politik. Proses penetapan standar akuntansi di FASB bukanlah semata-mata sebuah proses teknis, melainkan juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan politik yang kompleks. Dalam memilih alternatif akuntansi, FASB tidak hanya berpedoman pada teori dan riset akuntansi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Kepentingan masyarakat luas, seperti kesejahteraan sosial, harus menjadi pertimbangan utama (Mardiyah, 2002).

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan *Financial Accounting Foundation* yang menggambarkan proses penetapan standar akuntansi sebagai suatu bentuk demokrasi. Dalam proses ini, semua pihak yang berkepentingan, baik itu investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat umum, berhak untuk memberikan masukan dan pendapatnya. Dengan kata lain, standar akuntansi yang dihasilkan haruslah mencerminkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya kelompok tertentu saja (Mardiyah, 2002). Proses penetapan standar akuntansi tidak lepas dari pengaruh politik. Sama seperti aspek-aspek kehidupan lainnya, politik juga meresap ke dalam dunia akuntansi. Keputusan mengenai standar akuntansi yang akan diterapkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan kelompok yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada terhadap potensi intervensi politik dalam proses penyusunan standar (Melinda, 2024). Sensitivitas etika merujuk pada kapasitas seorang profesional dalam menunjukkan perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip etika serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami dilema etis. Ketiadaan pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip-prinsip etika akan mengakibatkan disfungsi skema moral dalam mengenali permasalahan etika (Firdiansyah et al., 2024).

Lembaga pembuat standar akuntansi, seperti FASB, perlu senantiasa berhati-hati dalam mengelola pengaruh politik. Jika tidak ditangani dengan baik, intervensi politik dapat mengkompromikan objektivitas dan kredibilitas standar akuntansi. Standar akuntansi yang berkualitas tinggi sangat penting bagi investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk membuat keputusan ekonomi yang rasional (Melinda, 2024). Pemahaman yang komprehensif memfasilitasi resolusi masalah yang efisien, serta mengarahkan pada penentuan strategi tindakan yang optimal untuk mencapai solusi terbaik (Lestari & Permatasari, 2020).

Pengaruh politik dalam penyusunan standar akuntansi memiliki dampak yang luas. Keputusan-keputusan politik dalam hal akuntansi tidak hanya memengaruhi perusahaan secara individual, tetapi juga dapat berimplikasi pada perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, standar akuntansi yang terlalu lunak atau terlalu ketat dapat mempengaruhi perilaku investasi, keputusan bisnis, dan bahkan pertumbuhan ekonomi

suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pertimbangan politik dan teknis dalam proses penyusunan standar akuntansi (Melinda, 2024).

Peran Konsekuensi Ekonomi Dalam Formulasi Kebijakan Akuntansi

Menurut Mathews dan Perera (1993) yang dikutip oleh Adam (2011) Proses penyusunan standar akuntansi seringkali digambarkan sebagai sebuah proses demokratis. Sama seperti pembuatan peraturan di lembaga legislatif, keputusan akhir mengenai standar akuntansi bergantung pada kesepakatan bersama. Namun, berbeda dengan sistem pemilihan umum yang murni berdasarkan suara mayoritas, penyusunan standar membutuhkan pertimbangan yang lebih luas. Berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari investor, auditor, hingga regulator, memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai standar akuntansi yang ideal. Oleh karena itu, proses penyusunan standar melibatkan dialog dan negosiasi yang intensif untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Meskipun bersifat demokratis, proses penyusunan standar juga mengandung unsur politik. Politik dalam konteks ini merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kepentingan yang saling bersaing. Penyusun standar dituntut untuk mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut dan menghasilkan standar yang adil dan relevan. Proses ini melibatkan pembelajaran yang berkelanjutan, karena standar akuntansi harus terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis (Adam, 2011).

Namun, penting untuk membedakan antara politik yang sehat dan politik yang tidak sehat. Politik yang sehat dalam konteks penyusunan standar adalah politik yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukti empiris, dan kepentingan publik yang lebih luas. Sebaliknya, politik yang tidak sehat adalah politik yang didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu atau individu yang bertujuan untuk memanipulasi standar akuntansi demi keuntungan pribadi (Adam, 2011). Dalam kesimpulannya, penyusunan standar akuntansi merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang berkualitas dan relevan, diperlukan keseimbangan antara aspek demokratis, politik, dan teknis (Adam, 2011).

Teori dan Praktik Standar Akuntansi

Dalam merancang sebuah institusi baru, sangatlah penting untuk memahami secara mendalam bagaimana standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh investor. Terdapat dua mekanisme utama yang perlu diperhatikan. Pertama, standar akuntansi dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan relevansi informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan analisis yang ketat untuk membandingkan nilai informatif dari berbagai standar akuntansi. Dengan mengidentifikasi standar yang paling informatif, kita dapat menciptakan lingkungan regulasi yang memberdayakan investor dan mendorong efisiensi pasar (Waymire & Basu, 2022). Hipotesis biaya politik berargumen bahwa perusahaan dengan profil publik yang tinggi akan berupaya mengelola citra publik mereka melalui pemilihan metode akuntansi. Perusahaan besar, sebagai contoh, seringkali memilih metode akuntansi yang konservatif, seperti mempercepat

pengakuan beban dan menunda pengakuan pendapatan, dengan tujuan mengurangi laba yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari regulator, pesaing, atau kelompok kepentingan lainnya (Setijaningsih, 2012).

Standar akuntansi yang efektif sangat penting untuk memfasilitasi perbandingan yang bermakna antara berbagai perusahaan. Dengan menyediakan kerangka kerja umum untuk pelaporan keuangan, standar-standar ini memungkinkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja relatif dan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan-perusahaan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi tren, membuat keputusan yang informatif, dan mengalokasikan modal secara efisien (Waymire & Basu, 2022).

Nilai suatu standar akuntansi seringkali terletak pada kemampuannya untuk mengoordinasikan evaluasi di antara berbagai perusahaan. Standar yang diadopsi secara luas dan diterapkan secara konsisten dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan. Hal ini karena memungkinkan investor untuk membuat perbandingan dan perkiraan yang lebih akurat. Meskipun detail spesifik suatu standar mungkin berbeda, penerapannya yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa standar tersebut berfungsi sesuai dengan tujuannya. Dengan mendorong standardisasi dan harmonisasi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar keuangan secara keseluruhan (Waymire & Basu, 2022). Pura (2013) dalam Sentosa & Zuraidah (2020) mencatat laporan keuangan yang akurat dan konsisten harus didasarkan pada prinsip persamaan akuntansi. Implementasi pencatatan yang sesuai dengan persamaan akuntansi akan menghasilkan keseimbangan antara total aset dengan jumlah ekuitas dan kewajiban entitas usaha.

Levi (1949) dalam Waymire & Basu (2022) menyatakan bahwa pembentukan standar akuntansi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan praktis dan permasalahan aktual yang dihadapi oleh entitas pelaporan keuangan, bukan semata-mata pada kerangka konseptual yang bersifat normatif. Dengan demikian, proses pengembangan standar akan lebih relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Melalui mekanisme hukum, praktik akuntansi dapat dievaluasi secara objektif dan sistematis, sehingga memungkinkan terbentuknya yurisprudensi akuntansi yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah akuntansi di masa mendatang. Dengan demikian, praktik akuntansi dan teori akuntansi akan berkembang secara organik dan berkelanjutan, seiring dengan perkembangan hukum pada umumnya.

Kesimpulan dan Saran

Proses penyusunan standar akuntansi merupakan perpaduan kompleks antara teori akuntansi, kepentingan politik, dan tekanan ekonomi. Meskipun teori akuntansi menyediakan kerangka kerja yang ideal, praktiknya seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Keputusan dalam penyusunan standar akuntansi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik berbagai pihak, seperti kelompok industri, regulator, dan investor. Mereka dapat melobi agar standar disusun sedemikian rupa

sehingga menguntungkan kelompok mereka. Terdapat potensi konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standar, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang murni. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang berkualitas, diperlukan keseimbangan antara pertimbangan politik, teknis, dan kebutuhan praktis.

Pengembangan yurisprudensi akuntansi melalui mekanisme hukum dapat membantu dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang kompleks dan memastikan bahwa praktik akuntansi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Secara keseluruhan, proses penyusunan standar akuntansi adalah suatu proses yang dinamis dan terus berkembang. Standar akuntansi yang baik adalah standar yang tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga relevan dengan praktik dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Proses penyusunan standar akuntansi perlu dilakukan secara transparan untuk meminimalkan pengaruh kepentingan pribadi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemangku kepentingan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan standar untuk memastikan bahwa standar yang dihasilkan relevan dan memenuhi kebutuhan mereka. Standar akuntansi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa standar tersebut tetap relevan dan efektif dalam merespons perubahan lingkungan bisnis.

Daftar Pustaka

- Adam, H. (2011). Konsekuensi Ekonomi Dan Proses Politik Dalam Penyusunan Standar Akuntansi. *Iqtishoduna*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.18860/iq.v1i3.199>
- Firdiansyah, Y., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2024). Dampak Pembelajaran Ekonomi Islam Dalam Membentuk Perilaku Moralitas Ekonomi Mahasiswa. 8(2), 132–139. <http://repository.uin-malang.ac.id/20308/>
- Gerboth, D. L. (1973). Research, Institution, and Politics in Accounting Inquiry. *The Accounting Review*, 48(3).
- Lestari, B., & Permatasari, D. (2020). Pengetahuan Etika Akuntansi, Religiusitas Dan Love of Money Sebagai Determinan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 133–146. <http://repository.uin-malang.ac.id/6330/1/Jurnal EL Muhasaba Baiq Dan Ditya.pdf>
- Levi, E. H. (1949). *An Introduction to Legal Reasoning*. University of Chicago Press.
- Mardiyah, A. A. (2002). Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(2), 96–123. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/809/933>
- Melinda, N. (2024). Hubungan Proses Politik Dan Konsekuensi Ekonomi Mempengaruhi Pembentukan Standar Akuntansi Oleh Fasb. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 20–28. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.464>
- Mikraj, A. L., & Waluyani, R. C. (2023). Pengaruh Teori Akuntansi Positif dalam Penelitian dan Implementasi Ilmu Akuntansi. 4(1), 1197–1209.

<https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4092>

- Purba, A. S., Rahmania, E., & Utami, D. (2018). Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb. *Akuntabel*, 15(2), 73–83. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Saragih, S. L., Marpaung, S. H., Muda, I., & Marbun, S. R. (2021). Approaches and criticisms of positive accounting theory and its economic consequences. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 2(4), 198–200. <https://www.allmultidisciplinaryjournal.com/archives/2021.v2.i4.342>
- Sentosa, G. D., & Zuraidah, Z. (2020). Rancangan Penerapan Sak Emkm Dengan Aplikasi Akuntansi Ukm Pada Body Gym Fitness Center Malang. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 17. <http://repository.uin-malang.ac.id/7082/1/7082.pdf>
- Setijaningsih, H. T. (2012). Setijaningsih: Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, XVI(03), 427–438.
- Waymire, G. B., & Basu, S. (2022). The Social Value of FASB. *Accounting, Economics and Law: A Convivium*, 12(2), 153–180. <https://doi.org/10.1515/ael-2021-0001>